

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Granit Obor, 2004.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ashsofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bahiej Ahmad, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Bakhri Syaiful, *Pidana Denda dan Korupsi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Bakhri Syaiful, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Jakarta: P.T Raja Grafindo, 2010.

- Dewa Gede Atmadja I, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, Cetakan Kedua, Malang: Setara Press, 2014.
- Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Efendi Mahsyur, *Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Cetakan Keenam, Jakarta: Kencana, 2017.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1986.
- Huijbers Theo, *Filsafat Hukum*, Cetakan Kelimabelas, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Husin Kadri dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- J. Moelong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan XXIV Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- K.M Smith Rhona, *et.al., Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Kansil, C.S.T Kansil *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Krisnayuda Backy, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indoensia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana, 2017.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Marbun Rocky, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2015.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marwan M., *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*, Cetakan Pertama, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Marzuki Suparman, *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PUSHAM UII, 201.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Renika Cipta, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Copyright, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

- Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Cetakan Kedua, Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2012.
- O.S Hiariej Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Pawennei Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Cetakan Keenam, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Program Magister Ilmu Hukum, *Buku pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis)*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Bandung: Citra Adiyta Bakti, 2006.
- Rasyid Ariman H.M., *Hukum Pidana*, Jatim: Setara Press, 2015.
- S. Praja Juhaya, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Cetakan ke II, Bandung, Pustaka Setia: 2014.
- Setiadi Edi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Shoelehuudin M., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, Cetakan Kedua, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Sunarso Siswanto, *Filsafat Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunaryo Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Suryana, *Metodelogi Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Tahir Heri, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010.
- Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila, *Kongres Pancasila: Pancasila Dalam Berbagai Perspektif*, Cetakan Pertama, Jakarta Barat: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Tunggul Alam Wawan, *Memahami Profesi Hukum*, Jakarta: Minia Populer, 2004.
- Van Bemmelen Mr.J.M, *Hukum Pidana I*, Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Cetakan I, Malang: Setara Press, 2013.

b. Jurnal

- Babiej Ahmad, "Arah dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember (2012).
- Djafar Wahyudi, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Edisi No. 5 Vol. 7, (2010).

Efendy Siregar Al Amin Sregar Rahmat, “Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan HAM,” Jurnal Fitrah, Vol. 1 No.1, (2015).

Faisal, Analisis Yuridis “Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 9 No. 2, (2018).

Johan Nasution Bahder, “Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern)”, Jurnal Al-Ihkam, Vol. 11 No. 2, (2016).

Johan Nasution Bahder, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 2, (2014).

Priyo Gunarto Marcus, “Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”, Mimbar Hukum, No.1 Vol. 21, (2009).

c. Internet

Arsylaw, “Implementasi Due Process Of Law Dalam Tata Hukum Modern Perspektif Perlindungan Korban Kejahatan”, dalam <https://arsylaw.wordpress.com/implementasi-due-proses-of-law-dalam-tata-hukum-modern-perspektif-perlindungan-korban-kejahatan/>, Akses 26 Juni 2019.

Damang Averroes Al-Khwarizmi, “Hukum dan Keadilan”, dalam www.negarahukum.com/hukum/hukum-dan-keadilan.html, Akses 11 Mei 2019.

<https://www.google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/3600908/kpu-bacaleg-eks-napi-korupsi-telah-dikembalikan-ke-parpol>, Akses 11 Mei 2019.

d. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

e. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang uji materil Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Nomor 46 P/HUM/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian pasal 58 huruf g Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 4/PUU-VII/2009.

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Irman

Gusman, Nomor: 112/Pid.sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap Nur

Alam, Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

